

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA BONTANG NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2016 secara operasional akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang merupakan muatan utama pada Bab ini. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini merupakan hasil seleksi prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis SKPD, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2015 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk Program Pembangunan Berkeadilan yang meliputi: Pro Rakyat, Justice For All (Keadilan untuk Semua) dan MDG's (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium).

Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, program pembangunan yang Pro Rakyat diuraikan lagi menjadi Program Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan), Program Pro Job (Pengurangan Pengangguran), Program Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan) dan Program Pro Growth (pertumbuhan Ekonomi).

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, Pemerintah Kota Bontang telah menyusun program-program pembangunan yang selaras dengan pencapaian kebijakan pembangunan tersebut. Dalam rangkaian proses Musrenbang tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015, telah disepakati program/kegiatan prioritas Pemerintah Kota Bontang yang dinyatakan selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016. Berdasarkan pertimbangan kemampuan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan diupayakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN, sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kota Bontang, maupun melalui APBD Kota Bontang.

Ditinjau dari aspek kewilayahan, kebijakan pembangunan pada tahun 2016 ditujukan untuk lebih memantapkan arah perkembangan

wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, RPJPD Kota Bontang 2005-2025, dan kebijakan pemerintah Provinsi yang menetapkan Kota Bontang sebagai daerah dengan kluster pengembangan industri berbasis migas dan kondensat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, wilayah Bontang Utara sesuai dengan industri basis yang memang telah ada dan merupakan salah satu industri strategis nasional akan terus didukung untuk dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis kimia. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan pada wilayah ini difungsikan untuk mengantisipasi potensi pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan potensi berkembangnya industri baik pada kawasan industri Pupuk Kaltim dan pada kawasan sekitarnya. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pengguna jalan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Bontang Utara yang merupakan wilayah paling padat diantara dua wilayah lainnya. Demikian pula layanan publik lainnya seperti pasar, sarana pelayanan kesehatan, dan infrastruktur pendidikan, Bontang Utara akan cenderung mendapatkan proporsi alokasi pembangunan yang relatif lebih besar sesuai dengan potensi, arah perkembangan, dan kompleksitas permasalahan pembangunandi wilayah ini.

Untuk mendukung dan memperlancar arus transportasi barang dan penumpang dari dan ke Bontang, Pemerintah Kota Bontang mengupayakan peningkatan dan mengptimalkan peran strategis pelabuhan Loktuan denganmengalokasikan anggaran pembangunan untuk penyelesaian fasilitas utama berupa lokasi penumpukan barang dan pagar pembatas kawasan pelabuhan. Selanjutnya sebagai antisipasi akan kebutuhan untuk memperlancar akses utama dari dan ke kawasan industri dan kawasan pelabuhan dimasa yang akan datang, pada tahun 2016direncanakan akan kembali mengupayakan pembangunan jalan lingkar pesisir sertapeningkatan Jalan Arif Rahman Hakim (Eks Jl. Kayu Mas) dan Jalan Cipto Mangunkusumo (Eks Jl. Pupuk Raya).

Wilayah Bontang Barat yang merupakan pintu gerbang utama masuk ke Kota Bontang, diarahkan untuk menjadi daerah penyangga bagi daerah sekitarnya. Dalam mewujudkan perannya sebagai daerah penyangga dan sesuai RPJPD Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 serta RTRW Kota Bontang maka pemerintah Kota Bontang telah melakukan enclave terhadap sebagian kawasan hutan lindung Bontang di sekitar Jalan Soekarno Hatta dan Jl. S. Parman untuk dijadikan kawasan pemukiman, perniagaan dan pusat perkantoran bagi lembaga swasta. Kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi potensi kebutuhan lahan untuk pemukiman dan sarana umum lainnya sejalan dengan semakin terbatasnya lahan diwilayah Bontang Utara.

Dengan fungsi sebagai daerah penyangga dan wilayahnya yang sebagian besar berbatasan/bersinggungan langsung dengan kawasan lindung, maka prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan untuk

menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi lindung dan kontinuitas ketersediaan sumber daya air. Beberapa prioritas pembangunan terkait fungsi ini adalah normalisasi danau Kanaan dan penurapan sungai di wilayah kelurahan Kanaan yang ditujukan untuk menurunkan pontesi terjadinya banjir pada wilayah hilir yaitu wilayah Bontang Utara.

Selanjutnya sebagai kawasan yang akan menjadi lokasi bagi pengembangan pemukiman baru, maka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan infrastruktur layanan publik lainnya juga terus dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi perkembangan penduduk.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Sebaran penduduk pada wilayah ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri pengolahan gas PT. Badak N.G.L. Mengacu pada RTRW Kota, selain ditetapkan sebagai lokasi pusat pemerintahan Kota Bontang, wilayah Kecamatan Bontang Selatan secara umum ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Kota Bontang. Kawasan ini umumnya masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Bontang Lestari yang merupakan kelurahan dengan luasan wilayah belum terbangun yang relatif sangat luas. Oleh karena itu pengembangan pembangunan akan diarahkan ke wilayah ini dengan pemanfaatan ruangnya direncanakan untuk perluasan kawasan industri, pusat perekonomian masyarakat serta pusat pendidikan dan pelatihan.

Untuk mendukung perencanaan ruang tersebut maka tahun 2016 prioritas pembangunan pada wilayah ini antara lain terkait dengan peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan yang akan mendukung percepatan perkembangan wilayah Bontang Lestari, termasuk didalamnya adalah pembangunan jalan menuju kawasan industri. Demikian pula pembangunan bandara beberapa tahapan awal pembangunan tetap akan diupayakan pada tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, prioritas pembangunan di wilayah Bontang Selatan masih terkait dengan pengembangan pasar Rawa Indah menjadi pasar modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tampung bagi pedagang dan untuk mengembangkan fungsi pasar tidak hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan pokok namun lebih jauh pasar hendaknya juga mampu menjadi tujuan wisata. Oleh karena itu pasar harus mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dengan kondisi ini diharapkan volume perdagangan akan meningkat sehingga ekonomi masyarakat akan meningkat pula. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik juga terus diupayakan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pemukiman.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2016, didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum perubahan diusulkan anggaran sebesar Rp.1.786.887.399.000,. Namun sejalan dengan revisi target-target Pendapatan Daerah dan Penerimaan

Pembiayaan, maka dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang diusulkan menjadi Rp.1.326.358.272.936,01. Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing SKPD yang disertai perkiraan maju dapat disampaikan sebagai berikut: